



**PROGRAM KOTAKU BANYAK DUKUNGAN**  
**Optimis Pengentasan Kawasan Kumuh Tercapai**

**YOGYA (KR) - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)** yang digulirkan di Kota Yogyakarta banyak mendapatkan dukungan. Target pengentasan kawasan kumuh hingga nol persen sampai akhir tahun ini pun optimis akan tercapai.

Menurut Koordinator Program Kotaku Kota Yogya Mahmud Al Haris, hingga awal Oktober pengentasan kawasan kumuh sudah mencapai 21 hektare. "Melihat capaian sampai dengan saat ini hingga akhir tahun, target nol persen kawasan kumuh bisa tercapai," tandasnya di sela workshop dan sosialisasi Program Kotaku di Balaikota, Rabu (9/10).

Total luasan kawasan kumuh di Kota Yogya tercatat 264,9 hektare. Tujuh puluh persennya merupakan kawasan yang berada di bantaran sungai. Hingga akhir tahun 2018, kawasan kumuh tersisa 50,3 hektare. Sedangkan Program Kotaku pada tahun ini dialokasikan Rp 17,5 miliar untuk menyasar sisa kawasan kumuh tersebut.

Mahmud menambahkan, kawasan kumuh dilihat dari tujuh indikator. Di antaranya bangunan, jalan, sanitasi, pengelolaan sampah hingga penanganan kebakaran. Dari tujuh indikator tersebut jika nilainya di atas 19 maka termasuk kawasan kumuh. "Sejauh ini Program Kotaku tidak mengalami hambatan. Kami justru mendapat banyak dukungan dari pemerintah daerah yang memiliki program sama namun dengan sasaran berbeda," imbuhnya.

Salah satu dukungan ialah penataan permukiman yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) Kota Yogya. Tahun ini, dana yang dikelola DPUPKP Kota Yogya untuk pengentasan kawasan kumuh juga cukup besar mencapai Rp 16,65 miliar.

Sementara Kasubid Tata Ruang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Yogya Cesaria Eko Yulianti, berharap pengentasan kawasan kumuh bisa sejalan dengan pengentasan kemiskinan. Salah satunya hasil penataan yang mempertimbangkan aspek estetika. Misal penataan bantaran sungai dibarengi dengan mengubah sungai menjadi halaman depan rumah warga. Warga pun bisa turut merawat sungai hingga menjadi daya tarik wisatawan. "Sektor pariwisata berpeluang mendorong ekonomi masyarakat secara signifikan," tandasnya.

Dirinya mencontohkan kecamatan dengan pendapatan daerah teratas, banyak ditopang dari industri pariwisata seperti jasa dan transportasi. Kecamatan tersebut antara lain Jetis, Gondomanan dan Gondokusuman.

Akan tetapi keberhasilan program juga sangat bergantung dari pola pikir masyarakat. Terutama dengan menggali potensi setelah wilayahnya tertata rapi.

"Penataan kawasan kumuh harus melibatkan kearifan lokal. Agar lokasi menjadi semakin menarik sebagai ruang terbuka dan menjadi destinasi wisata berbasis kampung," katanya. (Dhi)-m

Instansi	Tindak Lanjut
1. <b>Dm. PUPKP</b>	.....
2. ....	.....
3. <b>Bappeda</b>	.....
4. ....	.....
5. ....	.....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005